Indonesia Corruption Watch

ANNUAL REPORT

2018

Indonesia Corruption Watch

ANNUAL REPORT

2 0 1 8

Kata Pengantar

PENTINGNYA PENGELOLAAN PENGETAHUAN

Pertama-tama kami harus mengucapkan permintaan maaf karena laporan akhir tahun 2018 ICW terlambat hadir. Biasanya kami publikasikan paling lambat bulan Maret tiap tahunnya, seiring dengan selesainya laporan audit keuangan ICW untuk tahun yang sama.

Keterlambatan ini bukan karena faktor audit, namun lebih karena dua hal besar tengah dihadapi ICW. Pertama, 2018 adalah ujung dari rencana strategis ICW yang telah disusun sejak 2014. Kami memerlukan evaluasi apakah target-target yang telah kami tetapkan mencapai sasaran atau tidak. Proses ini diakui cukup panjang, dan berujung pada penilaian bahwa tidak semua target yang telah ditentukan berhasil diwujudkan.

Ada beberapa faktornya. Diantaranya, saat menyusun target, kami tidak mengukur faktor di luar yang sangat dinamis, dan tidak bisa dikendalikan. Bahasa lainnya, target kami terlalu muluk-muluk. Misalnya dalam isu pengorganisasian masyarakat. Karena ICW tidak memiliki kantor di tingkat *grass root*, tentu mencapai target yang diharapkan mustahil tercapai.

Hal lainnya, karena kami selama ini kurang memperdulikan proses mencatat, mendokumentasikan, dan mengelola bukti-bukti atas berbagai program dan advokasi anti korupsi. Akibatnya, ketika dituntut oleh evaluator eksternal untuk menyediakan

bukti-bukti tertulis dari apa yang telah diklaim sebagai keberhasilan program, hal itu tidak dapat dilakukan. Akibatnya, evaluator menganggap bahwa capaian itu masih sebatas klaim.

Tentu pada akhirnya kami harus belajar dari kesalahan. Kami sadar bahwa pengelolaan proses, capaian, keberhasilan, kegagalan dan berbagai praktek baik, termasuk didalamnya terobosan, pendekatan baru dan inovasi penting dilakukan. Untuk itu, dalam kerangka rencana strategis ICW 2018-2022 yang telah disahkan, kami hendak memperkuat internal kelembagaan ICW, dengan membentuk satu divisi baru bernama pengelolaan informasi dan pengetahuan. Bahasa bekennya adalah Knowledge Management System (KMS).

Tugas utama dari divisi baru ini adalah mengelola semua informasi dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh organisasi, menjadikannya sebagai sebuah proses yang tidak terputus, dari sejak ICW berdiri sampai hari ini, dan secara berkelanjutan, menyediakannya dalam format tertentu kepada seluruh komponen yang ada di ICW, kepada jaringan antikorupsi dan kepada masyarakat luas guna proses pembelajaran.

Semoga divisi baru ini dapat menambah kekuatan ICW dalam mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi, penguatan kelompok masyarakat dan jaringan antikorupsi di berbagai tempat di Indonesia.

Jakarta, April 2019
Laporan Akhir Tahun 2018

TRANSISI ORGANISASI, LANGKAH PEMBAHARUAN

Dimanapun sebuah organisasi akan berada pada titik balik. Salah satu penyebabnya, sumber daya manusia yang semakin senior, sehingga sudah tidak dapat lagi menggunakan 'baju' yang sama. Sementara para staff junior sudah harus mulai ditantang untuk menghadapi dan mengelola organisasi secara lebih mandiri. Bagi yang senior, mereka membutuhkan 'seragam' baru agar kontribusinya bagi organisasi tetap dapat dijaga. ICW tengah mengalami keadaan serupa. Oleh karenanya, dibutuhkan langkah antisipatif agar organisasi tidak jatuh pada kemandegan, atau bahkan penurunan kinerja.

Ada dua langkah besar yang diambil kemudian. Pertama, dilakukan restrukturisasi organisasi dimana beberapa staf senior tidak lagi ditempatkan sebagai badan pekerja, digantikan oleh staf yang lebih muda. Kedua, dibuat kebijakan untuk membentuk satu sayap organisasi, yang tujuan utamanya adalah mencari sumber pendanaan bagi gerakan anti korupsi. Dalam bahasa kekinian, sering disebut sebagai bisnis sosial. Para senior staf yang tidak lagi memegang komando ditugaskan untuk mengembangkan bisnis sosial ICW. Pada akhirnya, kami mendirikan sebuah usaha dengan nama PT Visi Integritas.

Kedua langkah di atas ditempuh dengan dukungan dari Ford Foundation dan REMDEC sebagai konsultan yang telah memfasilitasi kami dalam berbagai tahap dan proses transisinya. Kini, tugas berat ICW sebagian besarnya akan diambil-alih oleh anak-anak muda, yang mayoritas adalah perempuan. Hal ini perlu ditekankan karena ICW sejak lama telah membangun nilai-nilai tata kelola organisasi yang mengedepankan prinsip demokratis dan berbasis pada keadilan gender.

Sementara tugas berat bagi staf senior yang telah memiliki sekoci baru adalah mencari sumber pendanaan bagi gerakan antikorupsi, bukan hanya untuk ICW saja, akan tetapi juga untuk jejaring gerakan di berbagai tempat di Indonesia. Namun kami yakin, dengan pengalaman panjang dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi, dan keahlian yang telah dimiliki oleh awak PT Visi Integritas, usaha untuk memperoleh pendanaan untuk program antikorupsi akan berjalan dengan mudah.

LAPORAN AKHIR TAHUN ICW 2018

Konten: Tim ICW
Foto: Dokumentasi ICW
Layout: Sigit Wijaya

INDONESIA CORRUPTION WATCH
Jl. Kalibata Timur 4D No 6 Kalibata,
Jakarta Selatan
Tlp : 0217901885 / 7994015
Fax : 0217994005
w : www.antikorupsi.org
e : sahabaticw@antikorupsi.org
t : @sahabaticw/ @antikorupsi
f : Sahabat ICW
ig : @SahabatICW

Daftar Isi

PENTINGNYA PENGELOLAAN PENGETAHUAN 4
TRANSISI ORGANISASI, LANGKAH PEMBAHARUAN 7
MEMPERLUAS JANGKAUAN PENGGUNA OPENTENDER.NET 10
POTENSI KEHILANGAN PAJAK SEKTOR BATUBARA 12
DIPANDANG SEBELAH MATA 14
AKADEMI ANTIKORUPSI:
BELAJAR BERSAMA, BERSAMA MELAWAN KORUPSI 15
BERJUANG AGAR KORUPTOR TIDAK NYALEG 18
MELINDUNGI PEJUANG LINGKUNGAN 20
PEMBERDAYAAN PUBLIK OLEH PUBLIK:
SAKTI (SEKOLAH ANTIKORUPSI) 2018 22
DONASI PUBLIK ICW 2018
CAPAI RP 1,767 MILIAR 25
LAPORAN KEUANGAN ICW 2018 28

MEMPERLUAS JANGKAUAN PENGGUNA OPENTENDER.NET

Sejak diluncurkan Pada 2013 lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) terus berupaya mengembangkan plafform Opentender.net agar informasi yang disajikan lebih mudah dipahami dan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya baik untuk kepentingan pemantauan dan penelitian.

Atas dasar Itu, selain mendesain ulang tampilan opentender.net agar lebih menarik dan cepat dalam penyajian data, kami juga intensif membangun kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat termasuk dengan Perguruan Tinggi dalam bentuk pelatihan, konsultasi maupun kuliah umum.

Salah satu perguruan tinggi yang mulai memanfaatkannya di tahun 2018 adalah jurusan Administrasi Publik, Universitas Parahyangan, Bandung. Opentender menjadi instrumen pemantauan yang diajarkan kepada mahasiswa dalam mata kuliah Penganggaran Publik. Selain Itu, mahasiswa juga melakukan praktek turun lapangan untuk memantau pengadaan pemerintah berdasarkan data potensi risiko kecurangan yang didapat dari Opentender.

Hasil dari penelusuran tersebut kemudian dijadikan makalah sebagai bagian dari Ujian Akhir Semester.
Sebagaimana diketahui, sektor pengadaan barang dan jasa publik masih menjadi sasaran empuk korupsi. Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch dalam Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018, sebanyak 47% dari 254 kasus korupsi yang ditangani penegak hukum terkait pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah memang terus berupaya melakukan inovasi sistem pengadaan baik melalui tender online (*e-procurement*) maupin katalog online (e-katalog). Namun ruang terjadinya korupsi masih terbuka.
Pada saat yang sama, kapasitas masyarakat belum memadai untuk memantau sistem tersebut. Itulah sebabnya ICW terus berupaya memperkuat kapasitas masyarakat melalui pemanfaatan opentender agar mereka tetap bisa terlibat mendeteksi proyek-proyek pengadaan pemerintah yang beresiko sehingga potensi korupsi bisa dicegah.

Kedepan, ICW akan terus mendorong perluasan penggunaan instrumen Opentender di kalangan akademisi, terutama mahasiswa, agar lebih banyak anak muda terlibat dalam pengawasan di setiap tahap pengadaan barang dan jasa.

> **"Bagi mahasiswa, opentender tidak hanya menjadi media belajar dan mendapatkan pengetahuan mengenai potensi korupsi dalam e-procurement, namun juga menjadi media bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan analitik dan kemampuan melakukan pengujian ilmiah berbasis bukti terhadap potensi korupsi pengadaan barang dan jasa publik."**

Tutik Rachmawati, PhD
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, UNIKA Parahyangan

POTENSI KEHILANGAN PAJAK SEKTOR BATUBARA

Pada bulan Juli 2018, ICW meluncurkan buku "Batubara dan Ancaman Korupsi". Buku itu adalah hasil pemantauan ICW terhadap sektor batubara di Indonesia selama periode 2018. Hadir dalam peluncuran tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Dian Patria.

Sebagaimana banyak diketahui, batubara telah menjadi bancakan elit-elit kaya. Kondisi itu diperparah dengan buruknya pengelolaan dan pengawasan yang lemah. Sebagai salah satu produsen batubara terbesar di dunia, terang hal ini memprihatinkan. Dari pemantauan yang dilakukan ICW, ada beberapa masalah serius yang ditemukan.

Pemantauan berfokus pada dua hal, yakni indikasi kerugian negara akibat karut marut pengelolaan dan peta kepemilikan 10 perusahaan besar batubara di Indonesia. Hasil pemantauan menemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp 133,6 triliun. Ditemukan pula nama-nama elit kaya yang aktif dalam kancah perpolitikan Indonesia sebagai pemilik sebenarnya (Beneficial Owner) dari perusahaan besar batubara.

Pada aspek lainnya, ditemukan bahwa kepatuhan pelaporan pajak dari sektor batubara amat minim. Perbedaan data produksi yang dimiliki Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan minimnya koordinasi antar instansi berwenang.

Beramunisikan hasil pemantauan, ICW melakukan advokasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian ESDM, dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Semua lembaga mengamini bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan batubara dan kemudian berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Jika pengelolaan yang buruk dibiarkan, negara akan terus merugi. Elit-elit kaya yang menguasai perusahaan tambang batubara dapat memanfaatkan celah tersebut. Sumber daya alam yang mestinya dimanfaatkan untuk kepentingan publik seluas-luasnya, justru diselewengkan untuk kepentingan privat segelintir elit politik dan pengusaha besar tertentu. Dampaknya, kerusakan sumberdaya alam akan semakin masif, dan masyarakat umum akan menanggung akibatnya secara langsung.

"Pencegahan, melakukan supervisi terhadap pihak-Pemerintah bisa mencabut izin-izin non Clean and Clear (CnC). Kita dapat saling mengisi saja untuk sama-sama mendorong maksimal pajak."

Dian Patria
Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK

Aksi Hari Bumi Internasional, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Foto: Dokumentasi ICW

DIPANDANG SEBELAH MATA

Satu tahun pasca penyerangan terhadap Novel Baswedan, belum ada perkembangan signifikan dari negara untuk mengungkap pelakunya. ICW bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya tetap melakukan advokasi untuk mengungkap penyerangan tersebut, termasuk melalui kampanye publik, khususnya di media sosial. Sepanjang 2018, kampanye menggunakan tagar #SebelahMata berhasil mendapat perhatian besar dari publik.

Tokoh-tokoh publik seperti Najwa Shihab dan grup musik Efek Rumah Kaca – yang lagunya digunakan sebagai slogan kampanye publik kasus Novel Baswedan –, turut berpartisipasi dalam advokasi bersama kasus Novel Baswedan. Salah satu bentuk kampanye media sosial dengan tagar #SebelahMata yang cukup viral adalah covering lagu Sebelah Mata – ERK yang dilakukan oleh banyak orang, termasuk sesama musisi seperti Endah Widiastuti "Endah and Rhesa", Robi "Navicula", dan Saykoji.

> **"Saya hanya minta tanggung jawab negara"**
>
> **Rina Emilda**
> Istri Novel Baswedan

AKADEMI ANTIKORUPSI: BELAJAR BERSAMA, BERSAMA MELAWAN KORUPSI

"Dari penyelenggaraannya saja saya tahu ini mahal. Makanya saya tidak mau sia-siakan. Ini belajar daring terbaik yang pernah saya alami" (Leonnardo Sijabat, guru SMKN 4 Sorolangun, peserta Akademi Antikorupsi kelas Pedadogi Kritis dan Pendidikan Antikorupsi)

Indonesia Corruption Watch menyadari bahwa gerakan melawan korupsi harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil tetapi juga dengan seluruh rakyat yang sadar dan berdaya. Salah satu langkah strategis untuk mewujudkannya dengan mengembangkan Akademi Antikorupsi. Platform belajar berbasis digital yang akan memudahkan semua warga dapat belajar mengenai korupsi dan cara-cara memeranginya.

Sejak diluncurkan pada 19 April 2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Akademi Antikorupsi mendapat sambutan besar dari masyarakat. Peluncuran dihadiri sekitar 213 orang yang berasal dari berbagai latar belakang dan beragam daerah. Sedangkan para pembicara merupakan tokoh nasional seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dan Biro Hukum Kemendikbud, Chatarina Girsang.

Pada tahun pertama, ada enam mata kuliah yang ditawarkan di Akademi Antikorupsi, yaitu; pengantar antikorupsi untuk remaja, pengantar antikorupsi untuk dewasa/mahasiswa, pedagogi kritis dan pendidikan antikorupsi, sosiologi korupsi, hukum dan korupsi, serta kemiskinan dan korupsi. Dua mata kuliah pertama merupakan pengantar dan dibuka sepanjang tahun, sedangkan empat lainnya merupakan lanjutan yang hanya dibuka setiap empat bulan.

Tidak hanya peluncuran, jumlah orang yang mengikut proses belajar mengajar pun sangat banyak dan cenderung bertambah tiap bulan. Bahkan belum genap satu tahun, jumlah mahasiswa mencapai 2.881 orang dan 1.484 diantaranya aktif mengikuti kuliah. Mereka berasal dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Sebagian besar peserta adalah mahasiswa, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta, dan guru.

Respon perguruan tinggi juga sangat baik, jika tidak dikatakan luar biasa. Paling tidak sudah ada sepuluh perguruan tinggi yang telah membahas rencana rinci kerja sama dalam penggunaan Akademi Antikorupsi, empat di antaranya telah menandatangani perjanjian kerja sama (MoU). Bahkan dua perguruan tinggi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dan Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan (Poltekkes) Malang, langsung menggunakan Akademi Antikorupsi sebagai bagian dari kurikulum.

Menurut Dosen Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) Poltekkes Malang Khairuddin, keberadaan Akademi Antikorupsi sangat membantu dirinya. Apalagi program pembelajarannya berkualitas. Tujuan pembelajaran tersusun jelas sehingga mahasiswa mengetahui target pengetahuan

dan keterampilan yang akan dikuasai. Selain itu, materi pembelajaran yang dipaparkan melalui video dilengkapi unduhan transkrip dan referensi. “Keberadaan Akademi Anti Korupsi membantu membentuk mahasiswa berkarakter kuat, tidak takluk dan tanpa kompromi terhadap perilaku koruptif dan ikut berjuang dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Selain dengan perguruan tinggi, ICW pun menjalin kerja sama dengan jaringan antikorupsi daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas pengurus dan kaderisasi, mulai dari Truth Tangerang, Nalar Pandeglang, dan MCW Malang. Selain itu, penyelenggaraan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) yang merupakan agenda tahunan ICW, juga sudah menggunakan Akademi Antikorupsi, termasuk SAKTI untuk ASN dan Guru.

Untuk memperkaya materi kuliah di Akademi Antikorupsi, saat ini ICW tengah menyelesaikan pembuatan video belajar tiga mata kuliah baru: pengawasan anggaran desa, pengawasan dana politik, dan pengawasan anggaran publik. Diharapkan dengan semakin banyaknya materi, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memperkuat kapasitas dalam upaya melawan korupsi.

Launching sistem pembelajaran antikorupsi online akademi.antikorupsi.org di gedung kementerian pendidikan dan kebudayaan, Jakarta.

Foto: Dokumentasi ICW

“Persoalan korupsi tidak melulu soal pemberantasan. Pencegahan jauh lebih penting. Karena itulah mengedukasi masyarakat, mahasiswa dan pelajar untuk membangun sikap antikorupsi dan sekaligus mengenali apa itu korupsi menjadi amat krusial.”

DR. Abdul Hamid,
Kaprodi Ilmu Pemerintahan
Untirta-Banten

BERJUANG AGAR KORUPTOR TIDAK NYALEG

Tahun 2018 merupakan momen yang sibuk pagi partai politik untuk menyiapkan daftar calon anggota legislatif yang akan berlaga dalam pemilu 2019. Berbagai upaya dilakukan untuk memperjuangkan agar partai mereka bisa memenuhi ambang batas 4 persen (*parliamentary threshold*). Tentu kunci kelolosan tersebut ada pada para caleg itu sendiri sebagai "mesin pacu" agar ambang batas minimum terpenuhi.

Target tinggi tersebut pada gilirannya menyisakan masalah. Ada kecenderungan partai bersikap pragmatis untuk mengejar target pemenuhan ambang batas tersebut salah satunya dengan mengusung mantan narapidana kasus korupsi. Partai paham sekali mayoritas mantan terpidana kasus korupsi tersebut memiliki modal dana hingga modal basis konstituen yang pernah mereka jalin sebelumnya.

Keinginan partai untuk mengusung mantan napi korupsi menjadi caleg tentu membahayakan dari sisi kualitas pemilu. Secara akademis, pemilu adalah sarana bagi masyarakat untuk mencari wakilnya yang baik dan berkualitas. Bukan justru disodorkan calon yang memiliki persoalan hukum dan telah kehilangan basis etisnya sebagai calon pejabat publik.

Merespon perkembangan di atas, ICW bersama Koalisi Pemilu Bergerak untuk mendorong upaya agar partai tidak lagi mencalonkan mantan napi korupsi menjadi caleg. Bak gayung bersambut, wacana ini

"Harapannya ke depan semoga kerja-kerjanya lebih banyak mengekspos kinerja pemerintah kita salah satunya memberitakan terkait Caleg Mantan Koruptor yang saat ini hingga 81 orang... Jangan sampai ada koruptor didaur ulang untuk kembali mencalonkan diri."

Alia Amin
Sahabat ICW

ditangkap secara positif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menerbitkan Peraturan KPU No 20 tahun 2018 yang melarang partai politik untuk mencalonkan napi korupsi dalam daftar calon yang mereka serahkan kepada KPU.

Upaya ini tidak mudah karena mendapatkan serangan bertubi-tubi dari sejumlah mantan narapidana kasus korupsi yang keberatan. Anehnya, keberatan juga datang dari Badan Pengawas Pemilu dengan mengeluarkan sejumlah keputusan yang memerintahkan KPU untuk mencantumkan nama mantan terpidana korupsi dalam surat suara. Pertarungan pun bahkan hingga terjadi di Mahkamah Agung melalui upaya *judicial review*.

Dalam rangka memberikan dukungan atas PKPU larangan napi korupsi maju sebagai caleg, ICW bersama koalisi melakukan berbagai kegiatan konferensi pers, membuat petisi online, audiensi dengan KPU, menjadi ahli di persidangan yang semuanya bertujuan agar KPU mempertahankan sikap melarang mantan napi korupsi menjadi caleg. Perjuangan tersebut menjadi kandas karena putusan Mahkamah Agung.

Namun perjuangan panjang ini disadari membangun memori kolektif masyarakat agar tidak salah pilih caleg dengan memperhatikan rekam jejak masa lalu. Hal ini bagian dari pendidikan kepada pemilih. Meskipun MA telah menganulir keputusan KPU, ICW tetap dalam posisi untuk menyampaikan informasi kepada pemilih daftar nama caleg eks napi koruptor melalui platform sosial media. Agenda advokasi ini dilanjutkan dengan membuat aplikasi yang bisa digunakan pemilih untuk melihat rekam jejak para calon anggota legislatif DPR RI. ***

MELINDUNGI PEJUANG LINGKUNGAN

Perjuangan ICW dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi meliputi banyak aspek. Dari mulai melakukan investigasi kasus korupsi, melaporkan kasus korupsi ke penegak hukum, mengawal proses hukumnya sampai dengan menjaga agen-agen antikorupsi dari serangan balik koruptor. Sepanjang tahun 2018, ICW bersama dengan koalisi #savebasukiwasis melakukan pembelaan terhadap Basuki Wasis.

Basuki Wasis digugat oleh terdakwa korupsi, Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam (sekarang terpidana). Dia digugat lebih dari 3 triliun rupiah karena membantu KPK menghitung kerusakan lingkungan yang terjadi karena korupsi. Untuk menyelamatkan Basuki Wasis, ICW bersama dengan koalisi menempuh banyak cara dari sisi litigasi maupun non-litigasi. Hasilnya pada 13 Desember 2018, kerja keras ICW bersama koalisi berhasil melepaskan Basuki Wasis dari gugatan perdata.

Penyerahan petisi dukungan untuk ahli lingkungan yang dikriminalisasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Foto: Dokumentasi ICW

PEMBERDAYAAN PUBLIK OLEH PUBLIK: SEKOLAH ANTI KORUPSI (SAKTI) 2018

Sebagai agenda tahunan, SAKTI merupakan salah satu produk unggulan ICW dalam upaya meningkatkan kapasitas warga untuk memberantas korupsi. Pada tahun 2017, penyelenggaraan SAKTI masih didukung sebagian kecilnya dari lembaga donor, pada tahun 2018 seluruh pendanaan SAKTI, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, didapatkan dari donasi publik.

Sebagaimana pada tahun sebelumnya, program penggalangan dana SAKTI 2018 menargetkan donatur yang hampir sama, baik donatur individu dan korporasi. Strategi penggalangan dana dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pembuatan, pengiriman, dan presentasi proposal, kami juga menggunakan proposal elektronik (imooji) yang lebih interaktif. Kami juga menyelenggarakan makan malam penggalangan dana sebanyak dua kali, memberikan donasi online (Kitabisa.com), pembuatan video testimoni ajakan berdonasi dari *public figure*, pembuatan poster ajakan donasi, kampanye berdonasi dengan memanfaatkan media sosial ICW.

Sejumlah upaya penggalangan dana publik itu berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 474 juta. Jumlah tersebut berasal dari donasi 34 individu sebesar Rp 239 juta dan 11 korporasi sebesar Rp.236 juta. Perolehan dana tersebut belum sesuai dengan target namun tetap dapat menopang kebutuhan penyelenggaraan tiga tema SAKTI di tahun 2018.

Dengan anggaran di atas, ICW dapat melaksanakan kegiatan SAKTI Pemuda (10-19 Agustus 2018, di Sentul, Bogor), SAKTI ASN (Rumah Perubahan Bekasi, 9-12 Oktober 2018) dan SAKTI Aparatur Desa (Larantuka, Flores Timur NTT, 6-9 November 2018). Sedangkan untuk SAKTI Guru batal diselenggarakan karena terkendala jadwal akademik, sehingga baru dapat dilaksanakan pada Maret 2019.

Dalam kaitan dengan kerja penggalangan dana publik, program SAKTI telah mendapatkan banyak respon positif dari para Sahabat ICW. Setidaknya antusiasme dukungan publik tergambar dari perolehan donasi untuk SAKTI yang semakin besar. Pada saat yang sama, kami melakukan efisiensi dengan menerapkan pemanfaatan e-learning Akademi Anti Korupsi - sebuah platform kuliah online yang dikelola ICW - baik saat seleksi calon peserta SAKTI maupun sebelum dan sesudah pelaksanaan SAKTI. ***

“Saya akan mengarahkan seluruh staf pemerintah desa untuk tidak terlibat dalam praktik gratifikasi dan juga bentuk tindakan yang mengarah kepada KKN.”

Fransiskus S Maran,
Kepala Desa Kolek, Flores Timur,
peserta SAKTI DESA

Kegiatan warga Desa Birawan, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur memanfaatkan dana desa untuk membuat lapangan futsal.

Foto: Dokumentasi ICW

Grafik 1:
Total Donasi Penggalangan Dana Publik 2018

DONASI PUBLIK ICW 2018 CAPAI RP 1,767 MILIAR

Total donasi publik ICW yang berhasil dikumpulkan hingga 17 Desember 2018 mencapai Rp1.767.979.734. Jumlah tersebut berasal dari donasi melalui auto debet perbankan sebanyak Rp367.391.656, donasi SAKTI ICW 2018 sebesar Rp473.945.567, penjualan merchandise ICW sebesar Rp120.095.000, penyelenggaraan workshop berbayar sebesar Rp250.000.000 dan *inhouse training* sebesar Rp Rp240.000.000.

Penerimaan Donasi Publik Tahun 2018 telah melebihi dari target yang direncanakan (Rp1,2 Miliar) dan merupakan perolehan yang paling tinggi selama kurun waktu delapan tahun terakhir sejak dimulainya upaya penggalangan dana publik ICW. Kenaikan donasi yang signifikan terjadi karena penerapan strategi penggalangan dana tematik, yakni program donasi khusus untuk Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) dan kegiatan workshop berbayar. Pada tahun yang sama, berhasil diselenggarakan kegiatan workshop secara *inhouse training* untuk pertama kalinya.

Grafik 2:
Pendapatan PDP ICW 2010-2018

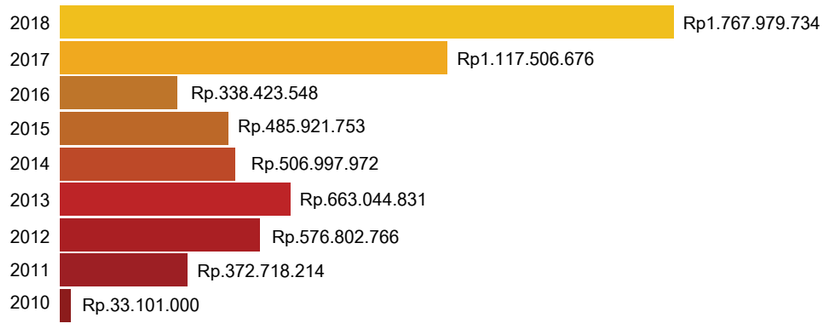

173 SUPORTER BERHASIL BERDONASI SETIAP BULANNYA UNTUK ICW

Pada tahun 2018 terdapat 395 suporter yang aktif berdonasi autodebet ke ICW. Dari jumlah tersebut, sebanyak 173 suporter berhasil berdonasi melalui mekanisme autodebet. Dari total supporter aktif, tingkat keberhasilan donasi mencapai setengahnya.

380 INDIVIDU DAN KORPORASI TELAH MENJADI SUPORTER (BARU) ICW

ICW mendefinisikan Sahabat atau Suporter ICW secara luas sebagai setiap orang-baik individu maupun korporasi yang memberikan dukungan terhadap kerja-kerja ICW dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan definisi tersebut, Suporter atau Sahabat ICW adalah mereka yang berdonasi dana maupun karya, pembeli produk (merchandise) ICW, ahli (expert) yang menyumbangkan keahliannya dan individu-individu yang membantu kegiatan atau advokasi yang dilaksanakan oleh ICW.

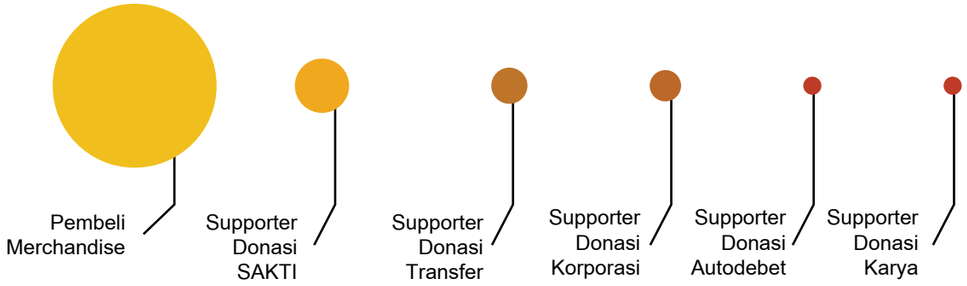

Grafik 3:
Jumlah Suporter Baru 2018

Selama 2018 terdapat 380 suporter ICW yang baru. Jumlah inti terdiri dari 4 orang yang berdonasi routine, 15 orang yang berdonasi transfer, 35 individu dan 11 korporasi yang berdonasi untuk SAKTI, 315 orang yang berdonasi melalui pembelian merchandise ICW dan 5 orang seniman yang mendonasikan karyanya.

"Saya mendukung kerja-kerja ICW karena tak terbayangkan perjuangan Indonesia berintegritas tanpa peran ICW. Harapan saya semoga ICW selalu jaga integritas dan kreatifitas!"

Bapak Hendronoto
Sahabat ICW

LAPORAN KEUANGAN ICW 2018

AKTIVA

Aktiva Lancar	
Kas dan Setara Kas	Rp. 13.994.157.456
Piutang Karyawan	Rp. 892.585.120
Uang Muka & Beban Dibayar di Muka	Rp. 314.318.390
Piutang Program	Rp. 882.585.354
Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 16.083.646.320
Aktiva Tetap	
Harga Perolehan	Rp. 7.479.339.901
Akumulasi Penyusutan	Rp. -984.241.890
TOTAL AKTIVA	Rp. 22.578.744.331

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

Kewajiban	
Kewajiban Lancar	Rp. 841.947.532
Total Kewajiban	Rp. 841.947.532
Aktiva Bersih	
Tidak Terikat	Rp. 16.279.303.262
Terikat Kontemporer	Rp. 5.457.493.537
Total Aktiva Bersih	Rp. 21.736.796.799
TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA	**Rp. 22.578.744.331**

PENERIMAAN

Dana dari Grantor	Rp. 17.532.061.905
Dana Tidak Terikat	Rp. 7.665.193.650
Total Penerimaan	**Rp. 25.197.255.555**

PENGELUARAN

Program	Rp. 13.105.016.456
Dana Tidak Terikat	Rp. 5.637.747.212
Total Pengeluaran	**Rp. 18.742.763.668**
Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih	**Rp. 6.454.491.887**

No	PROGRAM	DONOR	NILAI
1	- Pemberdayaan Warga Dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola Desa serta Dampaknya terhadap Pelayanan Publik Bermutu Dan Berkeadilan Melalui Pusat Sumber Daya Warga (PSDW) - Membangun Integritas Pemilu Melalui Pemetaan Rekam Jejak Calon Anggota DPR RI Periode 2019-2024	TIFA	Rp. 998.062.725
2	Strengthening CSO Capacity to Support Stronger Anti-Corruption Efforts	MSI Cegah	Rp. 2.448.037.743
3	Improving the Governance of Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF) in Indonesia Through Civil Society Participation	The Asia Foundation	Rp. 745.538.344
4	Core Support to ICW Strategic Plan 2014-2018	DANIDA	Rp. 157.897.747
5	For General Support and for Core Support for Institutional Strengthening	FORD Foundation	Rp. 10.734.538.170
6	Political Finance: Political Party Engagement and Reform	IFES	Rp. 6.398
7	Tackling Corruption in Coal Industry	European Climate Foundation	Rp. 906.595.980
8	Partnership for Civic Engagement in Open Contracting (GO OPEN 1016649)	HIVOS	Rp. 385.215.880
9	Unfolding The Political Relation in Tobacco Industry in Influencing The Tobacco Control Policy Making	Tobacco Free Kids	Rp. 132.235.403
10	POPSiCLE: PwD Oriented Public Services with Community-based Local Engagement	VOICE	Rp. 1.023.933.515
	TOTAL		**Rp. 17.532.061.905**

ICW DUDUKI PERINGKAT 27 DUNIA "TOP TRANSPARENCY AND GOOD GOVERNANCE THINK TANK" DARI THE LAUDER INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, USA

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduduki peringkat 27 dunia untuk kategori "Top Transparency and Good Governance Think Tank" dalam laporan "Global Think Tank" versi The Lauder Institute of the University of Pennsylvania, USA. Sudah delapan kali berturut-turut sejak tahun 2010 ICW mendapat peringkat 30 besar. Adapun ICW mendapat peringkat 65 untuk "Think Tank to Watch 2018", dari 114 institusi global, menurut laporan yang dirilis 31 Januari 2019 tersebut. Sementara pada level Asia untuk kategori yang sama, ICW menduduki peringkat ke-3 (ketiga) setelah Development Alternatives dan Centre for Good Governance, dua-duanya berasal dari India.

KARYA ANAK BANGSA WAKILI INDONESIA DALAM KOMPETISI #FUTUREAGAINSTCORRUPTION 2018

Indonesia Corruption Watch menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dalam kompetisi #FutureAgainstCorruption 2018 yang diadakan oleh Transparency International dan Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Jerman.

Dari 200 peserta yang berpartisipasi, inovasi pemantauan layanan publik yang digagas ICW dalam platform OpenTender.net berhasil masuk 10 besar. Negara-negara lain yang juga bersaing adalah Brazil, Bangladesh, Afrika Selatan, Kenya, Nigeria, USA dan Mexico.

#FutureAgainstCorruption Award merupakan kompetisi bagi anak muda dari seluruh dunia untuk menyampaikan ide dan inovasi dalam melawan korupsi. Proses kompetisi telah dimulai sejak pendaftaran dibuka pada 1 Oktober 2018. Inovasi yang masuk 3 besar akan diberi kesempatan untuk memaparkan inovasinya di Berlin, Jerman.

The Lauder Institute
Wharton · Arts & Sciences
UNIVERSITY of PENNSYLVANIA

KUNJUNGAN PERSAHABATAN DARI BERBAGAI PENJURU DUNIA

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2018 menerima berbagai kunjungan dari berbagai pihak, mulai dari kunjungan oleh Mahasiswa *Chonbuk National University* dari Korea Selatan hingga kunjungan kerja himpunan organisasi masyarakat dari Timor Leste. Berbagai kunjungan dari berbagai pihak ini penting bagi ICW karena dari pertemuan ini kami bisa berbagi pengalaman dan mengetahui kisah sukses pejuang antikorupsi dari berbagai tempat yang berbeda. Selain menerima kunjungan dari luar negeri ICW juga menerima undangan dari lembaga luar negeri seperti *OGP Asia Pasific Regional Meeting & Training OCDS* di Korea, *Conference PEPs (handling Asian PEPs)* di Singapore serta *Roundtable of CSOs contributing to fast tracking UNCAC implementation in Southeast Asia* di Bangkok Thailand.

MAKIN REDUP
IDEALISME
DAN HEROISME
PEMUDA
MAKIN BANYAK
KORUPSI

INDONESIA CORRUPTION WATCH
Jl. Kalibata Timur 4D No 6 Kalibata,
Jakarta Selatan
Tlp : 0217901885 / 7994015
Fax : 0217994005
w : www.antikorupsi.org
e : sahabaticw@antikorupsi.org
t : @sahabaticw/ @Antikorupsi
f : Sahabat ICW
ig : @SahabatICW